



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DOHRI AS'ARI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 207437

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.506.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 1.068 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 106.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 686 m2/63 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 630 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 70.000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 30.000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 1.020 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
9. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **110.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA ETIOS FALCO SEDAN Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	29.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.656.364
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.683.406.364
III. HUTANG	Rp.	309.151.176
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.374.255.188

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.